

MISI KEDUA					
TUJUAN DAERAH IK					
SASARAN DAERAH IK					
TUJUAN OPD IK DO					
SASARAN OPD IK DO					
PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
IK Program	SAKIP		IRB		
DO	Penilaian dari tim Asesor OPD		Penilaian dari tim		
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Keluaran kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun (laporan)	Jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang tersedia (paket)
Hasil kegiatan	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	Persentase jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel (%)	Persentase jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan (%)	Persentase jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Persentase jumlah paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)

Rerata dar

SUB KEGIATAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun (dokumen)	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai (unit)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rKA-SKPD yang tersusun (dokumen)	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun (laporan)	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (paket)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun (laporan)		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

<p>Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD yang tersusun (dokumen)</p>	<p>Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (laporan)</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)</p>	<p>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)</p>
<p>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</p>	<p>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p>	<p>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p>
<p>Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun (dokumen)</p>	<p>Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun (dokumen)</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)</p>	<p>Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (paket)</p>
<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>			
<p>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (laporan)</p>			<p>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p>
<p>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>			<p>Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)</p>
<p>Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (laporan)</p>			<p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
			<p>Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)</p>
			<p>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p>
			<p>Jumlah dokumen penatausahaan pada arsip dinamis SKPD (dokumen)</p>

Indikator Kinerja Utama :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Meningkatnya pelayanan publik yang prima
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan (skor)
Hasil survei kepuasan masyarakat

Meningkatnya pelayanan kecamatan
Cakupan layanan kecamatan (%)

i persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik ting

Asesor OPD

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase pelayanan publik yang tersedia (%)

Rerata dari persentase data pemerintahan yang dipublikasi, persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan dan persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (unit)

Persentase jumlah unit barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah laporan penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (jasa)

Persentase laporan penediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara (unit)

Persentase jumlah unit barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun (dokumen)

Persentase jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (%)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (dokumen)

Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (%)

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang menunjang pelaksanaan tugas (dokumen)

Persentase jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibaarkan pajaknya (unit)	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (laporan)	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan (dokumen)	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan (dokumen)
Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (dokumen)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan (laporan)	
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (laporan)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah (laporan)	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan (laporan)

Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)

Jumlah laporan penediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)



kat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif (%)
Rerata dari persentase kehadiran Musrenbang desa, Musrenbang kelurahan dan Musrenbang kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (%)

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani (%)

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desayang menunjang pelaksanaan tugas (dokumen)
Presentase jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa (%)

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan yang menunjang pelaksanaan tugas(dokumen)
Persentase jumlah dokumen kegiatan pemberdayaan kelurahan Kelurahan (%)

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (laporan)
Persentase jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang menunjang pelaksanaan tugas (%)

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (laporan)
Persentase jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menunjang pelaksanaan tugas (%)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala DaerahPerumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (dokumen)
Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang menunjang pelaksanaan tugas (%)

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musawarah perencanaan pembangunan di desa (lembaga kemasyarakatan)

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan dan swasta di wilayah kerja kecamatan (dokumen)

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (laporan)

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan di kelurahan (lembaga kemasyaratan)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (unit)

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (pokmas/ormas)

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan (laporan)

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (laporan)

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanandan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia (orang)

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (orang)

Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (laporan)

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Evaluasi Kelurahan

Jumlah laporan evaluasi
kelurahan (laporan)

Jumlah dokumen tugas forum
koordinasi pimpinan di kecamatan
(dokumen)



**PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA**

Persentase desa bertata kelola
pemerintahan baik (%)

**Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa**

Jumlah dokumen fasilitasi
rekomendasi dan koordinasi
pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa yang tersusun
(dokumen)

Persentase jumlah dokumen
fasilitasi rekomendasi dan
koordinasi pembinaan dan
pengawasan pemerintahan desa
yang menunjang pelaksanaan
tugas (%)

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (dokumen)

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa (dokumen)

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (dokumen)

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa (dokumen)

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa (dokumen)

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (dokumen)

Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (dokumen)

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (dokumen)

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif (dokumen)

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (dokumen)